

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Abdul R, Saliman, dkk, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2008, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi, 2009, "Pengertian Keuangan Negara Menurut UUD 1945, Pasal 23", dalam Arifin P. Soeria Atmadja (Editor), *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Akhmad Sukardi, 2009, *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta.
- A.K. Pringgodigdo, 1974, *Tiga Undang-Undang Dasar*, Pembangunan, Jakarta.
- Ali Ridho, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Alfin Sulaiman, 2011, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta.
- Amsal Bakhtiar, 2004, *Filsafat Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1989, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1991, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Arifin P. Soeriatmadja, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta.
- , 1993, "Kedudukan dan Fungsi Bepeka dalam Struktur KetataNegaraan Indonesia", dalam E. Suherman, Mulyana, dan Sidharta (Penyunting), 1993, *Kumpulan Tulisan Untuk Mengenang Teuku Mohammad Radhie*, Universitas Taruma Negara, UPT Penerbitan, Jakarta.

- , 2002, *Aspek Hukum Keuangan Negara pada Perseroan Terbatas yang Sahamnya Antara Lain Dimiliki oleh Negara*, Jakarta.
- , 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Asass, Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah, Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta.
- , 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi kedua), Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard L. Tanya, 2006, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Srikandi, Surabaya.
- Beerling, Kwee, Mooij, Van Peursen, 1986, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Balcks Laws Dictionary*. ST. Paul, Minn : West Publishing, Co.
- Bruggink, JJ.H., alih bahasa, B. Arief Sidharta, 2015, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Hukum Perusahaan Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1995, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- David Kelly, et.al, 2002, *Bussiness Law*, Cavendish Publishing Limited, London.
- Fachry Ali dan R.J. Lino, 2013, *Antara Pasar dan Politik: BUMN di Bawah Dahlan Iskan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Frans H. Winarta, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gorys Keraf, 1997, *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores.
- Guritno Mangkoesobroto, 1996, *Ekonomi Publik*, BPFE, Yogyakarta.

- Hadi Soesastro, dkk (ed), 2005, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: Krisis dan Pemulihan Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hari Purwadi, 2009, "Reformasi Hukum Nasional: Problem dan Prospeknya", dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, ed., 2009, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harun Al-Rasyid, 2009, "Pengertian Keuangan Negara (dalam hubungannya dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan), dalam Arifin P. Soeria Atmadja (Editor), *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harsono, 1986, *Kerjasama antara Perusahaan Negara, Swasta, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Universitas Brawijaya, Malang.
- Hendra Karianga, 2011, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Alumni, Bandung.
- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- H.F. Abraham Amos, 2007, *Legal Opinion, Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang: Buku 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Ekonomi Internasonal*, Keni Media, Bandung.
- Huibers, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Isharyanto, 2016, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ismail Saleh, 1998, "Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi", dalam Sularso Sopater, dkk, 1998, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Seri Membangun Bangsa Bidang Ekonomi, Politik, dan Teknologi, Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- , dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, 1989, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kerlinger, Fred N., 1990, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.



- Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum*, Genta Publishing, Jakarta.
- Kusumaningtuti SS, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1993, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Bandung.
- M. Dawam Rahardjo, 2003, "Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia", *Unisia*, Nomor 49/XXVI/III/2003.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mar'ie Muhammad dan Astar Siregar, 1985, "Badan Usaha Milik Negara", dalam Hendra Esmara (Penyunting), *Memelihara Momentum Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Martiono Hadianto, 1994, "Peran dan Posisi BUMN dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua", dalam Moh. Arsjad, dkk (editor), 1994, *Strategi Pembiayaan & Regrouping BUMN: Upaya Menciptakan Sinergi dalam Rangka Peningkatan Daya Saing BUMN*, Jakarta.
- Marwah M. Diah, 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia*, Literata Lintas Media, Jakarta
- Mexasai Indra, 2015, *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Mohammad Hatta, 1977, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta.
- , 1987, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Rusli Karim, 1997, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul dan Fungsi*, Tiara Wacana, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 1954, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djembatan, Jakarta.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, 1994, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nindyo Pramono, 2006, “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN”, dalam Sri Rejeki Hartono, dkk, editor, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Tanpa Penerbit, Jogjakarta.
- , 2012, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Normin S. Pakapahan, 1998, “Tatanan Hukum Ekonomi Pasar: Suatu Pendekatan Pembaharuan Hukum Untuk Pembangunan”, dalam Sularso Sopater, dkk, 1998, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Seri Membangun Bangsa Bidang Ekonomi, Politik, dan Teknologi, Sinar Harapan, Jakarta.
- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya.
- Pradjudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- , 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Editor, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- , 1998, “Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuur bevoegdheid*)”, *Pro Justitia*, Tahun XVI Nomor 1, Januari 1998.
- , 2010, *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi atas Tindak Pidana Pemerintahan*, makalah, Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 25 April s.d. 12 Mei 2010, Bogor.
- , dan Tatiek Sri Djamiati, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Reich, Robert B, Susiana Iskandar (Penerjemah), 1997, *Kerjasama Bangsa-Bangsa: Persiapan Menghadapi Abad 21*, Angkasa, Bandung.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan PerUndang-Undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rudhi Prasetya dan Neil Hamilton, 1974, "The Regulation of Indonesian State Enterprises", *Malaya Law Review*, volume 16, Nomor 2, Desember 1974.
- Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2011, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saafroedin Bahar, dkk. (Penyunting), 1992, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta.
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonnesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis: Buku Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- , 2008, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- , 2009, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Kompas, Jakarta.
- , 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, ed., 2009, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Scholten, Paul, 1992, *Mr. C. Asser, Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.



- Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Themis Books, Depok.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri-Edi Swasono, 1992, *Pelita Hati dari Daulat Tuanku ke Daulat Rakyat*, UI-Press, Jakarta.
- , 2005, *Menegakkan Ideologi Pancasila, Daulat-Rakyat versus Daulat-Pasar, The Real War: Perang Globalnya Nixon Sedang Terjadi*, PUSTEP-UGM, Yogyakarta.
- Sri Maemunah Suharto, 1996, *Pengelompokan BUMN dalam Rangka Penyusunan Tolok Ukur pada Evaluasi Kinerja di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Suhino, 1996, *Ilmu Negara*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sularso Sopater, dkk, 1998, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI, Seri Membangun Bangsa Bidang Ekonomi, Politik, dan Teknologi*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- , 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- , 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- T. Mulya Lubis, 1992, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tri Hayati, dkk, 2005, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, Jakarta.

- van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van Nederlandse Recht)*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta.
- Yance Arizona, 2007, *Penafsiran MK Terhadap Pasal 33 UUD 1945*, (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Komplikasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Yusuf L. Indradewa, 2009, "Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 ayat (5) UUD 1945", dalam Arifin P. Soeria Atmadja (Editor), *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zulkarnain Sitompul, 2007, *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan*, BooksTerrace & Library, Bandung.
- Z. Yasni, 1978, *Bung Hatta Menjawab*, Gunung Agung, Jakarta.

#### **Artikel/Jurnal**

- Agus Sahbani, 2012, *MK: Divestasi Newmont Harus Persetujuan DPR*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5017b88235b48/mk-divestasi-newmont-harus-persetujuan-dpr>, diakses tanggal 27 Agustus 2013, pukul 16:54 WIB.
- Ali, 2007, *Redefinisi Kerugian Negara Dengan Sinkronisasi Undang-Undang*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18031/redefinisi-kerugian-Negara-dengan-sinkronisasi-Undang-Undang>, diakses tanggal 28 Januari 2011, pukul 06:04 WIB.
- Albert Tommy, 2010, *Untung-Rugi Privatisasi BUMN*, <http://www.portalmix.fokal.info/fokal1/utama/kumpulan-utama/262.html>, diakses tanggal 26 Februari 2011, pukul 22:26 WIB.
- A. Mukthie Fadjar, 2005, "Pasal 33 UUD 1945, HAM, dan UU SDA", *Jurnal Konstitusi*, Volume 2 Nomor 2, September 2005.
- Antara Sumbar, 2013, *BUMN Gugat UU Keuangan Negara dan BPUKUL*, <http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d/0/295018/bumn-gugat-uu->



- [keuangan-Negara-dan-bpukul.html](#), diakses tanggal 17 Mei 2014, pukul 03:38 WIB.
- Arifin P. Soeriatmadja, 2007, “Badan Pemeriksa Keuangan Selaku Auditor dari Perspektif BUMN”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 1 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka: Masalah dan Prospeknya bagi Indonesia Inc*, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), diakses tanggal 18 Januari 2011, pukul 16:00 WIB.
- Bambang Kesowo, 1995, “Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995”, dalam *Newsletter*, edisi Nomor 23/VI/Desember 1995.
- Bismar Nasution, 2009, “Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan”, <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/pertanggungjawab-an-direksi>, diakses tanggal 28 Maret 2016, pukul 15:46 WIB.
- Cuk Prayitno, 2010, *Tinjauan yuridis kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan pertanggungjawaban pengurus Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero*, tesis, <http://eprints.ui.ac.id/74754/>, diakses tanggal 18 Januari 2011, pukul 16:24 WIB.
- Deni SB Yuherawan, 2009, *Inkonsistensi Kedudukan Hukum BUMN (Bagian II)*, <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hukum-bumn/page/3/>, diakses tanggal 18 Januari 2011, pukul 15:57 WIB.
- Endarto dan Moh. Ilham Nurhuda, 2007, *Penatausahaan Penyertaan Modal Negara: Kontrol Terhadap Investasi Pemerintah Pada BUMN*, <http://pbmkn.perbendaharaan.go.id/Artikel/003.htm>, diakses tanggal 21 Januari 2011, pukul 08:09 WIB.
- Erman Rajagukguk, 2001, *Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Orasi pada Dies Natalis Ke-44 Universitas Sumatera Utara, Medan, 20 Nopember 2001.
- , 2006, “Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara”, Disampaikan pada Diskusi Publik *Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.
- , 2006, Kekayaan BUMN Persero Bukan Kekayaan Negara, [http://www.unisodem.org/article\\_printfriendly.php?aid=6831&coid=2&caid=30](http://www.unisodem.org/article_printfriendly.php?aid=6831&coid=2&caid=30), diakses tanggal 27 Februari 2011, pukul 23:58 WIB.
- , 2011, <http://www.ermanhukum.com/Komentar%20hukum.htm>, diakses tanggal 17 Mei 2014, pk 04:02 WIB.
- Hakam Rahmatullah, 2012, Ideologi-Ideologi Yang Berkembang Di Dunia, <http://spiritwin.blogspot.com/2012/09/ideologi-ideologi-yang-berkembang-di.html>, diakses tanggal 15 Mei 2014, pukul 9:25 WIB.

- Ibrahim R, 2007, “Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, Nomor 1 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Inda Rahadiyan, 2013, “Kedudukan BUMN Persero sebagai *Separate Legal Entity* dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, Nomor 4, Oktober 2013.
- Ita Kurniasih, 2006, *Suatu Tinjauan Yuridis: Kerugian Negara Vs Kerugian Persero*, <http://cfisel.blogspot.com/2007/08/artikel-tentang-kerugian-negara.html>, diakses tanggal 21 Januari 2011, pukul 08:45 WIB.
- J.E.Sahetapy, dkk, 2006, *Definisi Keuangan Negara Kembali Diperdebatkan*, <http://beta.hukumonline.com/quart/berita/baca/hol15241/definisi-keuangan-negara-kembali-diperdebatkan>, diakses tanggal 27 Februari 2011, pukul 00:08 WIB.
- Kementerian BUMN, 2015, *Daftar BUMN*, <http://bumn.go.id/halaman/situs>, diakses tanggal 7 Juli 2015, pukul 10.15 WIB.
- , 2015, *Perkembangan Jumlah BUMN*, <http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN>, diakses tanggal 7 Juli 2015, pukul 10:30 WIB.
- Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, 2010, *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, 2004, “Batas-Batas Perbuatan Melanggar Hukum (Hukum Perdata) dan Perbuatan Melawan Hukum (Hukum Pidana)”, *Seminar Nasional: Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindakan Pidana Korupsi*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 6-7 Mei 2004.
- M. Udin Silalahi, 2007, “Analisis Hukum Privatisasi BUMN (UU No.19 Tahun 2003)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 1 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Otong Rosadi, 2009, *Memajukan Kesejahteraan Umum: Amanah Konstitusional*, <http://tebarkasih.blogspot.com/2009/08/artikel-memajukan-kesejahteraan-umum.html>, diakses tanggal 26 Maret 2014, pukul 08:20 WIB.
- Philipus M. Hadjon, 1997, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Yuridika*, Vol. No. 5 dan 6, Tahun XII, Sep-Des 1997.
- Program Doktor Ilmu Hukum, 2012, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Rahayu Hartini, 2010, *Kepailitan BUMN Persero*, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/05/kepailitan-bumn-persero-bagian-i/>, diakses tanggal 18 Januari 2011, pukul 17:01 WIB

- , *Harmonisasi Konsep Keuangan Negara Terhadap Kepailitan BUMN Persero Demi Menjamin Kepastian Hukum*, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/01/30/harmonisasi-konsep-keuangan-Negara-terhadap-kepailitan-bumn-persero-demi-menjamin-kepastian-hukum-bagian-vii/>, diakses 29 Februari 2012, pukul 12:40 WIB
- Ridwan Khairandy, 2007, “Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 1 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- , 2007, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan di Badan Usaha Milik Negara, Khususnya Perusahaan Perseroan dan Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi*, <http://www.scribd.com/doc/31980111/BADAN-HUKUM>, diakses tanggal 26 Februari 2011, pukul. 14:34 WIB.
- Romli Atmasasmita, 2007, *Kajian Hukum Pidana Atas Masalah Piutang Negara*, <http://www.legalitas.org/?q=Kajian+Hukum+Pidana+Atas+Masalah+Piutang+Negara> : diakses tanggal 21 Januari 2011, pukul 09:27 WIB.
- Rudhi Prasetya, 1996, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Kontrak Dalam Menyong-song Era Globalisasi*, **Makalah**, Pertemuan Ilmiah BPHN, Jakarta.
- Safri Nugraha, 2007, “Privatisasi BUMN, antara Harapan dan Kenyataan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 1 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Saldi Isra, 2016, *Catatan Atas Draf Usulan RUU Migas*, paper dalam *Focus Group Discussion (FGD)* “Menemukan Desain Konstitusional Tata Kelola Migas: Konstitusionalisasi Kaidah Hukum Migas Dengan Merumuskan Hukum Migas yang Konstitusional”, Kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta-Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Mercure Hotel, Padang, 15 Oktober 2016.
- Selatieli Zendrato, 2016, “Analisis Hukum Atas Pemeriksaan Kekayaan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Dan 62/Puu-Xi/2013”, *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Maret 2016.
- Soepomo, 2007, *Pemahaman Keuangan Negara*, <http://opinihukumkasus-lcbni.blogspot.com/2008/07/pemahaman-keuangan-Negara.html>, diakses tanggal 26 Februari 2011, pukul 23:21 WIB.
- Uray Yanice Neysa S, 2010, *Kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst.*, [http://eprints.undip.ac.id/24449/1/URAY\\_YANICE\\_NEYSA\\_S.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24449/1/URAY_YANICE_NEYSA_S.pdf), diakses 28 Januari 2011, pukul 06:24 WIB.
- Wuri Adriyani, 2009, *Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (Bagian I)*, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/02/23/persero-dalam-hukum-publik-dan-hukum-privat-bagian-i/>, diakses tanggal 18 Januari 2011, pukul 17:01 WIB.



-----, 2009, *Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat (Bagian X)*, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/27/persero-dalam-hukum-publik-dan-hukum-privat-bagian-x/>, diakses tanggal 15 Januari 2010, pukul 17:10 WIB.

Tjip Ismail, 2007, “Peranan BUMN dalam Penerimaan Pendapatan Negara: Tinjauan Perspektif Pajak”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 Nomor 1 Tahun 2007, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Zainuri, 2007, *Pemahaman Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, [http://zainuri-ngabetan.spaces.live.com/?c11\\_BlogPart\\_pagedir=Last&c11\\_BlogPart\\_BlogPart=blogview&c=BlogPart](http://zainuri-ngabetan.spaces.live.com/?c11_BlogPart_pagedir=Last&c11_BlogPart_BlogPart=blogview&c=BlogPart), diakses tanggal 28 Januari 2011, pukul 06:12 WIB.

Zarfinal, 2009, “Pengaruh Globalisasi Ekonomi Dalam Pembentukan Undang-Undang Kepailitan”, *Jurnal Ipteks Terapan (JIT)*, Volume 3, Nomor 1, April 2009.

-----, 2010, “Kedudukan Hukum Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dalam Persero”, *Jurnal Jurisprudencia*, Volume 3, Nomor 3, Januari 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1955 tentang Perubahan *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 419)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1958.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara ke Dalam Tiga Bentuk Usaha Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Persero.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perjan, Perum Dan Persero *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1990 tentang Persero Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1996;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 59 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2001.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

## **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-I/2002 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 tentang Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Kasus Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

